

**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**Gender Analysis Pathway (GAP) dan
Gender Budget Statement (GBS)**

TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Pahlawan Rawang Painan

Nomor : 600/ /Perkimtan-PS/III/2022 Painan, Maret 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Pengiriman Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) Tahun 2023* Kepada.
Yth. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pesisir Selatan
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kab. Pesisir Selatan No: 460/473/DSPPrPA-PS/II/2022 tanggal 18 Februari 2022 perihal tersebut diatas, bersama ini disampaikan kepada Bapak GAP dan GBS Tahun 2023 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman
Pertanahan dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

MUKHRIDAL, SH
NIP. 19640128 199309 1 001

MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	- Jumlah total rumah di Kab. Pesisir Selatan sampai kondisi Tahun 2021 adalah 114.594 rumah. Adapun jumlah rumah berdasarkan kondisi layak/tidak layak yaitu: Layak (103.763 rumah) dan Tidak Layak (10.831 rumah). - Jumlah rumah	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. Aspek Akses: Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. b. Aspek Partisipasi:	keterbatasan anggaran. Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data	Masih banyaknya data-data rumah tidak layak huni yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Layak Huni di kab. Pesisir Selatan	- Pendataan dan Validasi Data Rumah Tidak Layak Huni - Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni - Melakukan Evaluasi terhadap	Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak	Kegiatan 1: Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Sub Kegiatan: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	tidak layak huni yang sudah direhab dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah - Sasaran jumlah rumah yang tidak layak huni yang akan direhab sebanyak 10.831 unit rumah - Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. c. Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni d. Aspek Manfaat: Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat				tenaga pendamping RTLH	4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238 sedangkan jumlah RTLH adalah 2.467 unit, adapun rumah layak huni menjadi 111.771 Unit Tahun 2020 Jumlah Rumah 114.308, penanganan RTLH Tahun 2020 sebanyak 2.309 unit. Tahun 2021 Jumlah Rumah 114.594 unit, Penanganan RTLH Tahun 2021 sebanyak 514 unit Jumlah rumah	Input : Rp. 5.174.999.000,- Output: Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni Outcome: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasila

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Tujuan: Terlaksananya Pembangunan Rumah tidak layak Huni dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Pesisir Selatan	pembangunan dan keuangan Daerah	stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah					tidak layak huni yang sudah direhab dari tahun 2017 - 2021 sebanyak 8.451 unit rumah Secara penanganan dan target penanganan berdasarkan data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Jadi total penanganan sudah melebihi 1.552 unit.	n Rendah Kegiatan 2 : Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 100.000.000,- Output: Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
								diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Outcome: Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sanitasi layak	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. Aspek Akses: Tidak semua rumah masyarakat bias dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik.	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik	Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas atau belum dihibahkan	Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan,	- Pendataan dan Validasi Data Sanitasi Layak dan Sambungan Listrik - Sambungan Listrik Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah	Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memiliki jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit	Kegiatan 1 : Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk
Kegiatan: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Masih banyak rumah masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki sambungan listrik dan masih menumpang sambungan ke tetangga	b. Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam	Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	- Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit - Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2021 :	Input : Rp 2.464.999.920
Sub Kegiatan: Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019						Output: Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. c. Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan Sanitasi layak d. Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat.					1.987 Unit • Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2021 sebanyak 1.727 Unit	fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program: Pengembangan Perumahan Kegiatan: Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	- Belum ada data yang dihimpun untuk rumah yang terkena bencana - Masih banyak rumah masyarakat yang terkena bencana belum direhabilitasi	Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: a. Aspek Akses: Tidak semua rumah masyarakat direhabilitasi akibat bencana. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas.	keterbatasan anggaran. Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki data rumah masyarakat yang terkena bencana	Masih banyaknya data-data rumah korban bencana yang divalidasi	Terwujudnya Rumah Layak setelah rusak akibat bencana	Pendataan dan Validasi serta penyediaan rumah bagi korban bencana atau relokasi program pemerintah	- Untuk Tahun 2022 direncanakan untuk merehabilitasi rumah korban bencana sebanyak 11 Unit - Data rumah masyarakat yang berlokasi di kawasan rawan bencana di kecamatan Koto XI Tarusan sebanyak 74 Unit	Kegiatan 1 : Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah	b. Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas	masyarakat yang berada di lokasi rawan bencana			Melakukan Evaluasi terhadap Hasil Kegiatan	Input : Rp 49.999.970,- Output: Tersedianya data Rumah Korban Bencana untuk meningkatkan	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6		Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembukaan Wawancara	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender	
Tujuan: Terdatanya Rumah Korban Bencana di Kabupaten Pesisir Selatan		kebutuhan primer dan sekunder nya. c. Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan Sanitasi layak d. Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat.						fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Rumah Layak Huni akibat Bencana	

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembukaan Wawasan	ISU GENDER		KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL		
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	- Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah 1 buah bank sampah induk. 8 buah bank sampah. 5 – 15 orang personil pengelola bank sampah	Akses : - Masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat dari Bank Sampah. - Kerja sama antara masyarakat dengan pengelola bank sampah belum terjalin dengan baik. Partisipasi : - Partisipasi masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan kerja sama dengan bank sampah. Kontrol : - Belum jelasnya pemasaran Bank Sampah	- Belum menjadi prioritas kegiatan - Belum terpenuhinya kebutuhan bank sampah oleh pemerintah di setiap kecamatan atau pasar. - Masih kurangnya Sosialisasi tentang manfaat bank sampah	- Kesulitan dalam menentukan Lokasi Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan. - Kurangnya pemahaman an manfaat pengolahan sampah melalui Bank Sampah/pusat daur	Wadah tempat pengolahan sampah organik.	- Sosialisasi pemanfaatan Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan ke masyarakat. - Usulan DAK ke pusat dilengkapi dengan DED dan Kajian lingkungan.	1 buah bank sampah induk. 8 buah bank sampah. 5 – 15 orang Jumlah personil pengelola bank sampah	Input Rp.986.926.520,- Output Tersedianya 1 unit Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan. Outcome : Terkendalinya pencemaran lingkungan sampah anorganik.

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)
(Pernyataan Anggaran Gender)

**OPD : DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN
PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**
TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
KODE PROGRAM	1.04.04
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Jumlah rumah tahun 2017 sebanyak 107.469 dari 182 Nagari di kabupaten Pesisir Selatan. Adapun rumah layak 113.778 rumah dan tidak layak 6.309 rumah Tahun 2018 Jumlah rumah menjadi 114.188 rumah, adapun yang layak 110.095 rumah dan tidak layak 4.093 Rumah. Pada tahun 2019 jumlah rumah meningkat 114.238.Sedangkan rumah tidak layak huni 2.467 Unit. Adapun rumah layak huni menjadi 111.771 rumah Pada Tahun 2020 jumlah rumah 114.308 Unit. Penanganan RTLH Tahun 2020 adalah sebanyak 2.309 Unit. Jumlah rumah tidak layak huni yang sudah direhap dari tahun 2017-2020 sebanyak 7.937 unit rumah. Data TNP2K Tahun 2016 Jumlah RTLH adalah 6.387 Unit. Sedangkan total penanganan adalah 7.937 Unit. Berarti sudah melebihi target dan data sebanyak 1.552 Unit. Pada Tahun 2021 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni berdasarkan hasil validasi sebanyak 11.345 Unit. Penanganan RTLH Tahun 2021 sebanyak 514 Unit. Jumlah Rumah Tahun 2021 adalah 114.594 Unit. Jadi Rumah Layak Huni Tahun 2021 adalah 103.763 Unit, sedangkan sisa Rumah Tidak Layak Huni adalah 10.831 Unit . Dasar hukum kegiatan Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah.

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • Aspek Akses: Tidak semua rumah tidak layak huni bisa direhabilitasi. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. • Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. • Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan rumah layak huni • Aspek Manfaat: Karna bantuan rumah tidak layak huni masih bersifat stimulan (ransangan) dan masyarakat harus menyediakan dana tambahan untuk menyelesaikan pembangunan rumah b. Penyebab Internal • keterbatasan anggaran. • Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria rumah tidak layak huni yang berpengaruh terhadap data c. Penyebab Eksternal • Lahan yang digunakan untuk pembangunan RTLH belum bebas atau belum dihibahkan
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terwujudnya Rumah Layak Huni di Kabupaten Pesisir Selatan 2. Indikator dan Target Kinerja • Kegiatan 1: Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 5.174.999.000,- Output: Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni

		Outcome: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah • Kegiatan 2: Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Input : Rp. 100.000.000,- Output: Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha Outcome: Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 5.274.999.000,-	
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Perbaikan Rumah Tidak Layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Masukan	Rp. 5.174.999.000,-
	Keluaran	Tersedianya pembangunan Rumah tidak layak huni dan Rehab Rumah Tidak Layak Huni
	Hasil	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah
	Kegiatan 2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
	Masukan	Rp. 100.000.000,-
	Keluaran	Tersedianya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

	Hasil	Meningkatnya Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
--	-------	--

PROGRAM	PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
KODE PROGRAM	1.04.05
ANALISA SITUASI	3. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan proposal dari wali nagari masih ada data masyarakat yang belum memiliki jamban. Data yang masuk dari wali nagari sebanyak 3.252 unit. Data Masyarakat yang belum memiliki Sambungan Listrik sebanyak 2.896 Unit Penanganan Sanitasi Tahun 2017 – 2021 : 1.987 Unit Penanganan Sambungan Listrik 2017 – 2021 sebanyak 1.727 Unit 4. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender d. Faktor Kesenjangan Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • Aspek Akses: Tidak semua rumah masyarakat bias dibantu sanitasi layak dan sambungan listrik. Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas.. • Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menentukan skala prioritas kebutuhan primer dan sekunder nya. • Aspek Kontrol: kontrol dari tenaga pendamping berpengaruh terhadap pelaksanaan Sanitasi layak • Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat. e. Penyebab Internal • keterbatasan anggaran. • Dinas belum memiliki data base yang valid jumlah Masyarakat yang belum memiliki sanitasi layak dan sambungan listrik. • Masih kurangnya pemahaman wali nagari tentang kriteria masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah f. Penyebab Eksternal • Masih banyaknya data-data rumah yang belum divalidasi • Lahan yang digunakan untuk pembangunan Sanitasi Layak yang belum bebas

	atau belum dihibahkan		
CAPAIAN PROGRAM	3. Tolak Ukur Terwujudnya Rumah Bersanitasi Layak dan Memiliki Sambungan Listrik di kab. Pesisir Selatan		
	4. Indikator dan Target Kinerja Kegiatan 1: Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian Input : Rp. 2.464.999.920,- Output: Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian Outcome: Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 2.464.999.920		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Penyediaan Prasarana, sarana dan Utilitas umum di Perumahan untuk menunjang Fungsi Hunian	
		Masukan	Rp. 2.511.998.830,-
		Keluaran	Tersedianya PSU Perumahan untuk meningkatkan fungsi hunian
		Hasil	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk menunjang hunian yang Layak
PROGRAM	PENGEMBANGAN PERUMAHAN		
KODE PROGRAM	1.04.02		
ANALISA SITUASI	5. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) Berdasarkan amanat undang untuk Pemenuhan Standar pelayanan Minimal urusan perumahan ada dua SPM yang harus dipenuhi pada urusan Peumahan Rakyat yaitu Penanganan Rehabilitasi/Pembangunan/Relokasi Rumah Tidak layak Huni Akibat Bencana dan Relokasi Rumah Akibat Relokasi Program Pemerintah Kabupaten		

	6. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender g. Faktor Kesenjangan Isu kesenjangan yang dapat disimpulkan antara lain: • Aspek Akses: Tidak semua rumah akibat bencana bisa direhabilitasi/dibangun atau di relokasi Akses penerima bantuan dan kriteria kegiatan terbatas. • Aspek Partisipasi: Kurangnya kesadaran masyarakat karena masih berdomisili di lokasi rawan bencana. • Aspek Kontrol: Pengawasan dari Pihak Pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin mendirikan Bangunan apabila berada di lokasi rawan bencana • Aspek Manfaat: Bantuan bisa langsung dimanfaatkan dan difungsikan oleh masyarakat. h. Penyebab Internal • keterbatasan anggaran. • Regulasi tentang penanganan rumah akibat bencana belum selesai di susun i. Penyebab Eksternal • Lahan untuk relokasi rumah yang berada di kawasan rawan bencana belum tersedia, sehingga masih merehabilitasi di lokasi rawan bencana.
CAPAIAN PROGRAM	5. Tolak Ukur Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten
	6. Indikator dan Target Kinerja • Kegiatan 1: Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota Input : Rp. 49.999.970,- Output: Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten Outcome: Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten

	Kegiatan 2: Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Input : Rp. 42.050.000,- Output: Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Outcome: Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten Kegiatan 3: Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Input : Rp. 440.000.000,- Output: Jumlah Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi Outcome: Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana Kegiatan 4: Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota Input : Rp. 14.550.000,- Output: Jumlah Rumah Korban Bencana yang sudah didistribusikan Outcome: Terdistribusinya Rumah Korban Bencana yang sudah direhabilitasi		
JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 546.599.970,-		
RENCANA AKSI	<table> <tr> <td data-bbox="403 2215 528 2322">Kegiatan</td><td data-bbox="528 2215 1489 2322">Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</td></tr> </table>	Kegiatan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota
Kegiatan	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota		

	1	Masukan	Rp. 49.999.970,-
		Keluaran	Tersedianya Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten
		Hasil	Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten
	Kegiatan 2	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 42.050.000,-
		Keluaran	Terlaksananya sosialisasi dalam rangka persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten
		Hasil	Menambah Wawasan Calon Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana tentang persiapan penyediaan rumah akibat bencana
	Kegiatan 3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 440.000.000,-
		Keluaran	Rumah Korban Bencana yang direhabilitasi
		Hasil	Terehabilitasi Rumah Korban Bencana sebanyak 11 Unit
RENCANA AKSI	Kegiatan 4	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	
		Masukan	Rp. 14.550.000,-
		Keluaran	Jumlah Rumah Korban Bencana yang sudah didistribusikan
		Hasil	Terdistribusinya Rumah Korban Bencana yang sudah direhabilitasi
PROGRAM	PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		
ANALISA SITUASI	1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender) - Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah - 1 buah bank sampah induk. - 8 buah bank sampah. - 5 – 15 orang Jumlah personil pengelola bank sampah		

	2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender a. Faktor Kesenjangan Akses 1. Masyarakat belum memahami fungsi dan manfaat dari Bank Sampah. 2. Kerja sama antara masyarakat dengan pengelola bank sampah belum terjalin dengan baik. Partisipasi Partisipasi masyarakat masih rendah dalam memanfaatkan kerja sama dengan pengelola bank sampah. Kontrol Belum jelasnya pemasaran hasil Bank Sampah Manfaat Bank sampah belum memberikan kontribusi yang maksimal terhadap kesejahteraan masyarakat. b. Penyebab Internal 1. Belum menjadi prioritas kegiatan 2. Belum terpenuhinya kebutuhan bank sampah oleh pemerintah di setiap kecamatan atau pasar. 3. Masih kurangnya Sosialisasi tentang manfaat bank sampah c. Penyebab Eksternal 1. dalam menentukan Lokasi Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan. 2. Kurangnya pemahaman manfaat pengolahan sampah melalui Bank Sampah/pusat daur ulang sampah dan rumah pengomposan bagi masyarakat
CAPAIAN PROGRAM	1. Tolak Ukur Terbukanya lapangan pekerjaan bagi kaum laki-laki dalam menambah pendapatan keluarga 2. Indikator dan Target Kinerja Meningkatnya income keluarga sebesar 50 %

JUMLAH ANGGARAN PROGRAM	Rp. 986.926.520		
RENCANA AKSI	Kegiatan 1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/TPSA Kabupaten	
		Masukan	Rp. 986.926.520
		Keluaran	Jumlah Bank Sampah Yang Terkelola dengan baik 11 Unit
		Hasil	Jumlah kaum laki-laki yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

Painan Maret 2022

**KEPALA DINAS PERUMAHAN KAWASAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP
KAB. PESISIR SELATAN**


MUKHRIDAL, SH

NIP. 19640128 199309 1 001